
PERANAN UNICEF DALAM MEMULIHKAN DAN MEMPERBAIKI LAYANAN AIR BERSIH DAN SANITASI DI ACEH

Asri Wulandhari

Magister Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: asriwulandhari@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the programs and challenges faced by UNICEF in restoring and improving clean water and sanitation services in Banda Aceh. This research is descriptive with data collection techniques in the form of documentation studies. The results showed that the UNICEF program was rehabilitation of drinking water installation maintenance, design and reconstruction of water pipelines, water supply in rural areas, rehabilitation of sewage treatment plant installations and increasing PDAM capacity. Meanwhile, the challenge faced is that Aceh is an area that has been in conflict with the central government for 30 years because of the separatist movement (GAM). However, this is not a big challenge because both parties signed a 2005 peace agreement; the ongoing process of decentralization; there is a transition to recovery towards sustainable development.

Keywords: *Challenges, UNICEF, Clean Water, Sanitation, Aceh.*

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2015, telah disepakati *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan keberlanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs). Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-70, SDGs memiliki tujuan tentang pembangunan baru dan menjadikannya sejarah baru bagi pembangunan global yang dimulai dari tahun 2016 hingga 2030 mendatang. Menurut Panuluh (2016), lima prinsip dasar dari SDGs dapat menyeimbangkan beberapa aspek, seperti lingkungan, sosial dan ekonomi adalah *People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership*.

Dalam persetujuan SDGs menghasilkan 17 target dan 169 misi, berbeda halnya dengan MDGs yang memiliki 8 target dan 21 misi saja. Dalam prosesnya, kelemahan yang dimiliki oleh MDGs disebabkan perancangan Hal itu

disebabkan MDGs yang memiliki kelemahan, seperti peran stakeholder non-pemerintah tidak diikutsertakan dalam perancangan dan praktek eksklusif dan birokratis yang dilakukan. Stakeholder non-pemerintah tersebut seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi atau kampus, bisnis dan swasta, dan kelompok lainnya. Namun, beberapa tantangan dari SDGs pun tidak bisa ditampik, karena masih adanya unsur-unsur yang menjadi target MDGs yang belum sepenuhnya diraih dan dilanjutkan dalam SDGs. Ada sekitar 193 kepala negara dan pemerintahan anggota PBB yang menjadi saksi dan menyepakati SDGs tersebut, termasuk Negara Indonesia (Panuluh, 2016).

Di Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 telah mengatur bagaimana seharusnya SDGs diterapkan. Keterlambatan implementasi SDGs berusaha dihindari oleh Pemerintah Indonesia, karena Indonesia mengalami keterlambatan 10 tahun dari pengesahannya pada tahun 2000 dalam implementasi MDGs sebelumnya. Pemerintah Indonesia menjelaskan perihal keterlambatan tersebut, yaitu karena Indonesia pada saat itu sedang berproses memulihkan situasi perekonomian setelah krisis yang terjadi di tahun 1998.

Terdapat 17 target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden yang telah diuraikan dari praktek SDGs yang juga masuk ke dalam misi nasional tahun 2015-2019 di Indonesia, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Development Goals dalam Perpres Nomor 59 tahun 2017 salah satunya ada di poin ke 6, yaitu tentang Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk masyarakat. SDG bekerja dengan membuat pilihan terbaik guna meningkatkan kehidupan berkelanjutan dalam spirit kemitraan dan pragmatisme dan dipersiapkan untuk generasi masa depan. Pada umumnya, mereka memberikan pedoman dan target yang jelas Bagi negara-negara agar mengadopsi sesuai tantangan dan kebutuhan lingkungan dunia.

Terdapat sasaran pembangunan dalam berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, aspek kesehatan dan aspek lingkungan. Dalam pembangunan berkelanjutan, salah satu aspek yang terbilang penting

adalah aspek kesehatan, yaitu dalam hal memastikan tersedianya serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah air bersih dan sanitasi layak. Memastikan masyarakat memperoleh akses universal air bersih dan sanitasi merupakan salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada sektor lingkungan hidup. Bencana gempa bumi yang disusul tsunami yang melanda Aceh mengakibatkan kerusakan parah, terutama pada bagian jaringan air dan sanitasi minim. Diantaranya adalah instalasi pengolahan, tanker air dan truk hampa udara. Parahnya lagi, Satu-satunya sarana pengolahan lumpur di Banda Aceh mengalami kerusakan parah yang membuatnya hancur, sehingga menyebabkan saluran air menjadi tersendat karena tidak dapat digunakan.

Air yang ada didalam banyak sumur dan lapisan tanah menjadi terkontaminasi dan asin akibat terjangan bencana tsunami. Ratusan ribu rumah milik beberapa keluarga individu hancur atau rusak parah, dan hal tersebut menyebabkan mereka kehilangan pasokan air dan sarana kebersihan. Dalam permasalahan ini, UNICEF berperan dalam membantu memulihkan dan memperbaiki layanan air di Aceh dengan membentuk beberapa program yang juga didukung oleh Pemerintah Swiss. Namun, dalam membantu memulihkan keadaan air di Aceh, UNICEF menghadapi beberapa tantangan yang menyebabkan tersendatnya pemulihan tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu sudah ada membahas tentang peran UNICEF yang membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan di beberapa bidang (Asbar, 2011; UCLG, 2010; Oktadewi, 2018). Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis program dan tantangan yang dihadapi UNICEF dalam memulihkan dan memperbaiki layanan air bersih dan sanitasi di Banda Aceh.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pandangan utama konstruktivis digambarkan dengan adanya perbedaan mendasar antara realitas kasar global dan realitas sosial konstruktivis, identitas berperan sangat penting. Dengan perbedaan pandangan tersebut memungkinkan terciptanya kerangka kerja yang anarkis, norma-norma dapat bermunculan dan terbentuk dengan sendirinya. Fokus dari pendekatan ini adalah lebih kepada dunia yang didalamnya terdiri dari negara-negara, namun tidak universal, semisal *humanity* (kemanusiaan).

Sebagian negara menciptakan masyarakatnya dengan norma-norma terikat sesuai proses interaksinya. Konstruktivis membahas perihal fenomena sosial (dunia politik) adalah terstruktur secara sosial, dan memiliki dua dasar : pertama, bahwa dari struktur fundamental dari politik internasional adalah sosial daripada materi semata (klaim menentang materialisme). Kedua, struktur ini menentukan identitas aktor dan kepentingan, daripada hanya perilaku mereka (klaim yang menentang rasionalisme). Konstruktivis memiliki kepentingan untuk menggunakan norma sebagai saran untuk memperbaiki keadaan atau melakukan perubahan sosial. Hal ini merupakan sisi kritis dari konstruktivis. Teori ini menolak jika hanya fokus pada material saja, tetapi yang paling penting dari aspek internasional adalah sosial, bukan materi (Jackson, dkk., 2019).

Beberapa konsep dari konstruktivis yaitu terdiri dari ide, norma, konstruksi sosial, identitas aktor, dan kepentingan aktor. Menurut Checkel, konstruktivisme terdiri dari agent (negara), struktur (norma dan institusi), dan perilaku agen dipengaruhi oleh struktur. Proses konstruksi sosial dan norma dipengaruhi oleh politik internasional, sehingga bisa dilihat hubungan ide dan norma adalah kepentingan negara dan perilaku negara (kebijakan) (Azizah, 2016).

Berdasarkan teori konstruktivis tersebut, ada beberapa hal yang menjabarkan perilaku yang dilakukan oleh beberapa peran, seperti UNICEF dibantu dengan beberapa negara, di Aceh. Yaitu, dengan melakukan rehabilitasi layanan air bersih dan sanitasi dan program lainnya. Perilaku yang demikian dalam pandangan konstruktivis merupakan sebuah norma yang ditunjukkan melalui kegiatan-kegiatan sosial dalam bentuk hubungan bilateral.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menjelaskan program dan tantangan yang dihadapi UNICEF dalam memulihkan dan memperbaiki layanan air bersih dan sanitasi di Aceh. Teknik pengumpulan data adalah data sekunder yang berasal dari beragam buku, artikel, jurnal, koran, dan internet.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Air minum dan sanitasi yang aman adalah salah satu hak asasi manusia dasar. Prasyarat dalam mencapai banyak dimensi pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan, keamanan, pangan, dan pengurangan kemiskinan salah satunya adalah dengan memudahkan akses ke air bersih dalam jumlah dan kualitas yang cukup. Ekosistem yang berhubungan dengan air sangat penting bagi kehidupan dan selalu menyediakan situs alami untuk pemukiman manusia, membawa manfaat seperti transportasi, pemurnian alami, irigasi, perlindungan banjir dan habitat untuk keanekaragaman hayati. Namun, populasi yang semakin meningkat, intensifikasi pertanian, urbanisasi, dan produksi industri mulai membanjiri dan melemahkan kemampuan alam untuk memenuhi fungsi-fungsi utama dan menyediakan layanan utama. Memang terdengar menakutkan, karena dalam memenuhi kebutuhan air di masa depan secara berkelanjutan merupakan sebuah tantangan, namun hal tersebut dapat diatasi. Manajemen sumber daya air sistematis dapat diterapkan di semua level (termasuk tingkat lintas batas)

dan mengutamakan air dan sanitasi ke dalam kebijakan dan rencana sektor lain merupakan hal yang penting.

Salah satu tantangan utama bagi Indonesia adalah menyediakan akses berkelanjutan ke air minum bersih dan sanitasi dasar. Meskipun telah ada perbaikan, kondisi air dan sanitasi masih sangat buruk di banyak daerah di Indonesia. Hal ini menghasilkan tingkat kerentanan tinggi terhadap penyakit terkait air, terutama di kalangan anak-anak. Bagi anak-anak, air bersih, toilet dasar dan praktik kebersihan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup dan perkembangan mereka. Kehidupan jutaan anak akan berisiko tanpa adanya kebutuhan dasar berupa air bersih. Di Indonesia, kurang dari 30% rumah tangga memiliki akses ke sumber air dan hanya kurang dari setengahnya yang tidak memiliki sanitasi. Dibutuhkan waktu yang lama setiap harinya hanya untuk mencapai sumber air. Di beberapa daerah, air dijual tetapi untuk keluarga miskin dapat menelan biaya, bahkan hingga setengah dari pendapatan bulanan mereka.

Tsunami yang meluluh lantakkan Aceh 2004 silam, permukaan air di kawasan pasca bencana di kota atau kabupaten di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam pada umumnya berwarna kecoklatan hingga kehitaman, keruh dan berbau menyengat. Faktanya memang air tersebut tidak layak digunakan masyarakat setempat, bahkan Tidak termasuk ke dalam syarat layaknya air minum, berbanding terbalik dengan permukaan air lainnya yang bersifat tawar. Dengan begitu air perlu diolah secara khusus dengan tambahan proses yang juga spesifik pengolahannya (Sutapa, 2009). Begitu pula pada saat gempa terjadi (sebelum tsunami melahap habis wilayah Aceh tahun 2004), dikarenakan terputusnya jaringan air bersih PDAM dan sumur milik penduduk yang tertutup reruntuhan gempa, membuat para pengungsi kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Butuh waktu untuk memperoleh air bersih dan PDAM pasca gempa, karena perlu adanya perbaikan jaringan distribusi maupun sarana instalasi pengolahan air bersih PDAM.

Penduduk juga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih saat banjir menghadang, mulai dari penduduk yang tidak mau meninggalkan permukiman, hingga penduduk yang mengungsi ketempat lain. Dalam beberapa hari, sumur gali maupun sumur pompa terendam genangan banjir, tidak hanya itu, tempat pengungsian juga tidak tersedia sarana air bersih maupun sanitasi yang memadai. Pasca bencana banjir, sumur gali maupun sumur pompa tercemar baik secara kimia maupun bakteriologi (Hidayat & Raharjo, 2011).

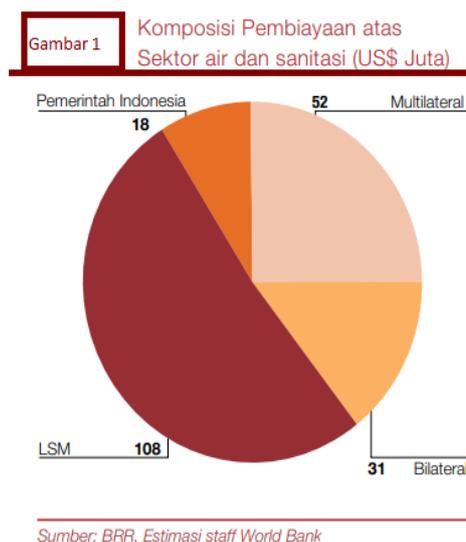
Terdapat sekitar 300 kepala keluarga yang berada di Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, khususnya di Desa Lambada Lhok yang harus menjadikan air sumur hasil bor untuk dikonsumsi, yang bahkan diduga sudah terkontaminasi juga akibat tsunami. Warga terpaksa melakukan hal tersebut karena sulitnya mendapatkan air bersih. Abdul Kader selaku Geuchik (kepala) Desa Lambada mengatakan, setelah 10 tahun silam tsunami melanda Aceh, fasilitas air bersih belum pernah merasakan warga di desanya dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (detik.com). Air sumur bor tersebutlah yang digunakan masyarakat untuk keseharian. Tidak mudah untuk mendapatkan air dari sumur bor ini. Sistem air bergilir yang dialiri ke semua rumah penduduk dengan jumlah sekitar 1000 yang membuat masyarakat sulit mendapatkan air.

Diperkirakan Aceh hanya memiliki PDAM tak sampai 0 persen jangkauan layanan. Sekitar 9 persen penduduk yang memiliki saluran pipa di keseuruhan provinsi. Melalui septic tank atau lubang buangan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, pemeliharaan sanitasi di Aceh dilakukan di lokasi. Tantangan utama dalam melaksanakan rekonstruksi juga dilakukan guna membangun kembali sarana-sarana yang cukup memenuhi kebutuhan penduduk yang mendukung operasi berkelanjutan yang efisien.

1. Program yang Dibentuk UNICEF dalam Memperbaiki Layanan Air Bersih dan Sanitasi di Aceh

Diperkirakan sekitar US\$213 merupakan pendanaan yang tersedia dari beberapa LSM dan donor untuk sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan air dan kebersihan di Aceh dan Nias. Banyak LSM dan instansi internal turut berpartisipasi dalam pendanaan tersebut. Kerusakan dan kerugian akibat bencana tsunami Aceh tahun 2004 diperkirakan mencapai US\$64 juta atau US\$77 juta bila disesuaikan dengan inflasi. Dengan demikian, saldo sektor menunjukkan sebesar US\$137 juta, dan US\$131 juta untuk berbagai kebutuhan dasar (BRR, 2005). Bila dibandingkan dengan biaya pergantian aset-aset sebelumnya, jumlah dana yang dibutuhkan untuk memperluas pendistribusian air dan saluran pembangunan serta prasarana tingkat rumah tangga lebih banyak untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Dalam memecahkan masalah ini, pemerintah membagi dua tahapan program Pertama, tahap Tanggap Darurat yang menyangkut berbagai sektor, mulai dari pembersihan area dari reruntuhan, pencarian dan pengangkatan korban meninggal, penyelamatan korban yang masih hidup dan lain-lain. Kebutuhan air bersih dan penyehatan lingkungan (ABPL) adalah hal utama yang perlu diperhatikan perihal bantuan darurat bagi korban selamat. Tahap kedua, yakni Tahap Konstruksi adalah melakukan kegiatan pemenuhan AMPL tersebut. Masalah pendanaan menjadi hambatan bagi pemerintah Indonesia dalam melaksanakannya.



Dapat dilihat dari grafik tersebut (Gambar 1) bahwa rancangan pembiayaan untuk masalah air dan sanitasi dalam US\$ juta, Pemerintah Indonesia berada di tingkat paling bawah. Bahkan jauh sebelum tsunami Aceh terjadi di tahun 2004, saat Aceh dihadapkan dengan bencana alam lain, seperti banjir yang dahsyat. Hujan deras dan sistem drainase yang tidak memadai menewaskan ratusan orang dan membuat ribuan lainnya mengungsi hampir setiap tahun. Dalam upaya memperbaiki situasi ini, Prancis menyediakan dana untuk rehabilitasi sistem drainasi Banda Aceh serta pelatihan pengelolaan sistem air. Bekerjasama dengan yayasan 'Air Kita' (*Our Water*), pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum, anggota BAPPENAS dan pejabat air setempat menerima pelatihan dalam pengelolaan air terpadu (Blue Book, 2012).

Selain itu, Swedia menyediakan dana untuk Program Air dan Sanitasi Bank Dunia (WSP). Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan air limbah dan pengelolaan limbah padat ke dalam pembaruan sektor sanitasi. Program ini mencakup pengembangan kapasitas, advokasi, dukungan untuk peningkatan kebijakan dan manajemen pengetahuan. Kerjasama multilateral antara Indonesia, Prancis dan Swedia dalam mendanai untuk perbaikan sistem drainase saat

banjir dahsyat menyapu Banda Aceh, dapat mengendalikan kelebihan air permukaan.

Dalam memperbaiki dan memulihkan penyediaan air bersih dan sanitasi di Banda Aceh saat tsunami tahun 2004, terdapat lima program yang dibantu dan dibiayai oleh Pemerintah Swiss dan UNICEF dalam merehabilitasi dan menambah pelayanan yang direncanakan atau sudah beroperasi, berikut program-programnya:

a. Rehabilitasi perawatan instalasi air minum

Pemerintah Swiss membiayai rehabilitasi instalasi utama perawatan air di daerah Lambaro, sementara UNICEF dan GTZ membiayai pekerjaan di Siron 1 dan Siron 2. Keduanya menyediakan air ke Banda Aceh dan Aceh Besar. Hal yang diusulkan oleh UNICEF adalah memperbaiki 20 instalasi perawatan air lain di Aceh. Kapasitas masukan dari instalasi perawatan di Meulaboh telah diperbaiki dan ditingkatkan oleh Palang Merah Spanyol. Sumber gambar: www.pu.go.id.

Intalasi pengolahan diletakkan di bagian atas sebuah mobil truck berukuran sedang dengan peralatan sebagai berikut (Masuqi, 2014):

- 1). 1 pompa intake
- 2). 5 pompa kimia
- 3). 5 tangki kimia
- 4). 1 diesel generator set dengan daya 1,4 KWH
- 5). 1 unit panel listrik
- 6). 1 unit pengaduk cepat
- 7). 1 unit pengaduk lambat (6 tabung aliran atas-bawah)
- 8). 1 unit bak pengendap dengan pelat pengendapan
- 9). 1 pompa untuk filter bertekanan dan distribusi
- 10). 1 tangki penyaring
- 11). 2 tangki penukar ion

Dimensi pengolahan:

- 1). Tinggi: 1600mm

2). Lebar: 1300mm

3). Panjang: 1700mm

Pompa filter bertekanan:

1). Jenis pompa celup

2). Kapasitas 35 liter/menit

3). Total head 4 meter

4). Tenaga listrik 50 watt

b. Rancangan dan rekonstruksi jaringan pipa air di Banda Aceh

Jaringan penyediaan air primer dan sekunder di Aceh mendapat dukungan dana dari JICS sebesar US\$5 juta. Jaringan sepanjang 177 km akan mengikuti jalur yang ada, serta akan melalui pipa-pipa, katup, meter air dan pipa penegak (*standpipes*). Jaringan baru sedang dibentuk guna mempersiapkan 90 persen dari perkiraan 279.000 jumlah penduduk Aceh 2009.

c. Persediaan air di pedesaan

Dana sejumlah US\$27 juta dikeluarkan untuk merehabilitasi sarana penyediaan dan sanitasi air masyarakat dan pembangunan sarana baru sesuai permintaan masyarakat. Selain itu, kapasitas serta pelatihan staf kebersihan air, sanitasi, *hygiene* dan kesehatan juga ditingkatkan di level provinsi, kabupaten dan desa yang telah dialokasikan oleh ADB sebanyak US\$27 juta.

d. Rehabilitasi instalasi perawatan tangki tinja Banda Aceh

Sebuah instalasi perawatan tinja baru sedang dibiayai oleh UNICEF dengan kapasitas perawatan 60 meter kubik per hari untuk dibangun di sebelah instalasi yang telah ada.

e. Peningkatan kapasitas PDAM

Beberapa LSM internasional seperti UNICEF, USAID-ESP, IRD, Swiss (kantor Wali kota Jenewa) dan Belanda/SAD-SAS telah mengusulkan adanya pelatihan bagi PDAMs, dengan menaruh fokus awal pada pengoperasian peralatan baru dan kemudian untuk program jangka panjang.

2. Tantangan yang Dihadapi oleh UNICEF dalam Memperbaiki Layanan Air Bersih dan Sanitasi di Aceh

Bencana Tsunami yang meluluhlantakkan Aceh mempengaruhi persediaan air secara masif. Tsunami juga menyebabkan alur perdagangan telah hancur tersapu di beberapa kawasan yang terkena dampak paling parah. Di kawasan yang kondisinya dapat dikatakan tidak begitu parah mengalami naiknya air dan menyebabkan lahan serta sejumlah sumur yang tak terlindungi terbanjiri oleh pasir, reruntuhan, air laut, bahkan kotoran manusia di kawasan pesisir. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat setempat yang sering buang air dalam kondisi terbuka tidak layaknya fasilitas sanitasi disana. Tak berselang lama setelah tsunami menyapu wilayah Aceh, tenaga ahli dan sanitasi UNICEF adalah organisasi PBB yang pertama kali turun ke lapangan untuk mengkoordinir pendistribusian air bersih ke para pengungsi.

Dalam menjalankan tugasnya untuk memperbaiki layanan air bersih dan sanitasi bagi para pengungsi Tsunami Aceh, tentu saja terdapat tantangan yang dihadapi oleh UNICEF. Mengingat tugas yang dilakukan terbilang cukup berat karena akses saat terjadi Tsunami masih kurang kondusif, ditambah Aceh yang sangat terisolasi dan mengalami keterbelakangan karena konflik antara GAM dan Pemerintah Pusat yang berlangsung cukup lama yaitu 30 tahun. Beruntungnya, hal ini memudahkan UNICEF karena kedua belah pihak telah menandatangani kesepakatan damai tahun 2005, sehingga dapat berkontribusi dalam lingkungan yang damai.

Selain itu, tantangan yang jauh lebih besar yang dihadapi UNICEF adalah proses desentralisasi yang terjadi secara terus-menerus. Ini adalah hal baru yang terjadi di Indonesia, sehingga lembaga-lembaga di Indonesia dan organisasi nirlaba harus beradaptasi terlebih dulu. Secara bersamaan mereka bekerja dan berjalan menuju arah yang baru demi memastikan pendekatan ini mampu menangani kesejahteraan anak-anak dan penduduk di Aceh. Di waktu yang samaan, UNICEF juga harus menghadapi transisi pemulihan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan hal tersebut adalah jalan yang sulit.

Sumberdaya yang diinvestasikan oleh masyarakat internasional untuk Aceh semakin lama semakin menipis. Sumberdaya tersebut berupa hardware (infrastruktur, pusat kesehatan masyarakat, sistem air bersih, jalan, perumahan) yang juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah guna memastikan bahwa struktur-stuktur tersebut berfungsi dan dijaga dengan baik. UNICEF juga turut membantu pemerintah daerah agar keterbatasan sumber daya dapat dimanfaatkan dengan tepat.

E. KESIMPULAN

Hal yang paling utama dilakukan dalam tahap tanggap bencana adalah ketersediaan air bersih dan layak minum, utamanya di kawasan bencana. Tidak hanya menjadi hak hidup paling mendasar bagi makhluk hidup, utamanya manusia, kebutuhan air bersih juga menjadi pusat keberhasilan suatu Negara dalam melindungi hak-hak masyarakat di dalamnya. Belum lagi, akses yang harus ditempuh untuk mendapatkan air bersih saat bencana terjadi sangatlah tidak mudah bagi penduduk yang selamat. Padahal, kebutuhan air bersih dan sanitasi adalah penting bagi kesehatan mereka, terutama anak-anak.

Dengan adanya program-program, seperti rehabilitasi perawatan instalasi air minum, rancangan dan rekonstruksi jaringan pipa air, persediaan air di pedesaan, rehabilitasi instalasi perawatan tangki tinja dan peningkatan kapasitas PDAM yang dicanangkan oleh UNICEF untuk Indonesia lebih memudahkan masyarakat Aceh dalam memperoleh air bersih dan sanitasi.

Meski demikian, pelaksanaan program tersebut tidaklah berjalan mulus. Beberapa tantang harus dihadapi oleh UNICEF dan lembaga-lembaga Indonesia dalam pelaksanaannya. Tantangan-tantangan tersebut berupa : Aceh merupakan wilayah yang pernah berkonflik dengan pemerintah pusat selama 30 tahun karena adanya gerakan separatisme (GAM). Namun, hal tersebut bukan tantangan besar karena kedua pihak

telah menandatangani kesepakatan damai tahun 2005; proses desentralisasi yang terjadi secara terus-menerus; adanya transisi pemulihan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asbar, F. A. (2018). *Upaya UNICEF Dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Tsunami Aceh Tahun 2004-2010*.
- Azizah, N. (2016). *Critical-Constructivist Theories in International Relations*. UMY.
- Blue Book. (2012). *Friendship Based on Shared Values*. EU-Development Cooperation 2010/2011.
- Erwandari, N. (2017). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(3), 875-888.
- Hidayat, R. & Raharjo, B. R. (2011). *Penanganan Air Bersih Pengungsi Bencana Gempa dan Banjir*. Kolokium Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Air, Bandung.
- Humas Setkab. (2017). *Inilah Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs*. Diakses dari <http://setkab.go.id/inilah-perpres-pelaksanaanpencapaian-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs/> pada 29 Mei 2019.
- Jackson, R., Sørensen, G., & Møller, J. (2019). *Introduction to international relations: theories and approaches*. Oxford University Press, USA.
- Krisis Air Bersih, 300 KK di Aceh Konsumsi Air Terkontaminasi Saat Tsunami. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/2689215/krisis-air-bersih-300-kk-di-aceh-konsumsi-air-terkontaminasi-saat-tsunami> pada 29 Mei 2019.
- Laporan bersama BRR dan rekanan-rekanan internasional. 2005. *ACEH DAN NIAS SETAHUN SETELAH TSUNAMI Upaya Pemulihan Dan Langkah Ke Depan*. Nias, Aceh.
- Masuqi, A. (2014). *Teknologi Sederhana pada Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Pasca Bencana*. Seminar Nasional Teknologi Lingkungan XI-ITS, Surabaya 3 Desember 2014.
- Nias, B. N. (2009). *Aceh Dan Nias Setahun Setelah Tsunami Upaya Pemulihan Dan Langkah Ke Depan*.
- Oktadewi, N. (2018). Peranan UNICEF dalam Menangani CHILD TRAFFICKING di Indonesia. *Journal: Islamic World and Politics*, 2(2).
- Oktadewi, N. (2019). Peranan UNICEF Dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia. *Journal of Islamic World and Politics*, 2(2), 345-365.

- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Diakses di www.infid.org pada 29 Mei 2019.
- Sutapa, I. D. (2014). Optimalisasi Dosis Koagulan Aluminium Sulfat dan Poli-Aluminium Klorida (PAC) Untuk Pengolahan Air Sungai Tanjung dan Krueng Raya. *Jurnal Teknik Hidraulik*, 5(1), 29-42.
- UCLG (United Cities and Local Government). "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah": SDG 06, Air Bersih dan Sanitasi. Hlm. 9.